

**ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP
TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2005-2021**



Skripsi Oleh:

MARYAM NURHILMA ALFIAH

01021181722013

Ekonomi Pembangunan

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
2024**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDRALAYA

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI
INDONESIA (PROVINSI)

Disusun Oleh:

Nama : Maryam Nurhilma Alfiah
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif skripsi.

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING

Tanggal: 17 November 2023


Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si
NIP.198506122015101101

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2005-2021

Disusun oleh:

Nama : Maryam Nurhilma Alfiah

NIM : 01021181722013

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Konsentrasi : Keuangan Daerah

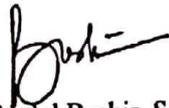
Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 3 Januari 2024 dan telah memenuhi syarat untuk diterima

Panitia Ujian Komprehensif

Indralaya, 22 Mei 2024

Anggota

Ketua



Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si

NIP. 198506122015101101

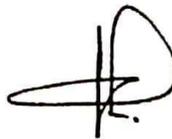


Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si

NIP. 196903142014092001

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 22-5-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maryam Nurhilma Alfiah
NIM : 01021181722013
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Ekonomi Keuangan Daerah
Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2021

Pembimbing : Dr. Abdul Bashir, S.E., M. Si
Tanggal Ujian : 3 Januari 2024

Adalah benar hasil karya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 21 Mei 2024

Pembuat Pernyataan

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN 21-5-2024
FAKULTAS EKONOMI UNSRI



Maryam Nurhilma Alfiah

01021181722013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi yang berjudul **Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2021**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Penulisan penelitian ini dapat terlaksana berkat sumber-sumber referensi yang sangat membantu dalam penulisan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung serta membantu selama proses penyelesaian skripsi.

Saya mohon maaf apabila penelitian ini banyak kekurangan, oleh sebab itu saya mengharapkan agar pembaca penelitian ini dapat memberikan saran serta kritik yang membangun bagi saya.

Penulis,



Maryam Nurhilma Alfiah

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu menjadi tempat mengadu segala keluh, kesah, dan syukur selama masa penyusunan skripsi ini.
2. Terima kasih yang paling istimewa diberikan kepada keluarga peneliti, Ayahanda Abdul Ghofar, Ibunda Evi Martini, dan kedua adik perempuan Nada dan Nawwira yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan selama proses perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Mukhlis, S.E., M.Si selaku ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dr. Siti Rohima, S.E., M.Si selaku dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
6. Della Ramadini sebagai teman yang telah banyak membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
7. Monika Syaharani, Devy Mayang, Ayu Sagita, Nadiya Angraini, dan Erna Dwi sebagai teman dekat selama kuliah. Terima kasih telah mewarnai hidup penulis.

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2005-2021

Oleh:

Maryam Nurhilma Alfiah; Abdul Bashir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan daerah terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di 33 provinsi yang ada di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan periode penelitian yaitu tahun 2005-2021. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis dengan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan; (b) rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan; (c) rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: *Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kemiskinan*

Mengetahui

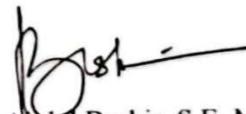
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dosen Pembimbing



Dr. Mukhlis, S.E., M.Si

NIP. 197304062010121001



Dr. Abdul Bashir, S.E., M.Si

NIP. 198506122015101101

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL RATIO ON POVERTY IN INDONESIA 2005-2021

By:

Maryam Nurhilma Alfiah; Abdul Bashir

This research aims to analyze the effect of regional financial ratios on poverty. This research was conducted in 33 provinces in Indonesia. The data used in this research is secondary data with the research period namely 2005-2021. The analysis technique used is an analysis technique with panel data. The results of this study show that (a) regional financial efficiency ratios have a positive but not significant effect on poverty; (b) regional financial effectiveness ratios have a positive and significant effect on poverty; (c) the regional financial independence ratio has a negative and significant effect on the poverty.

Keywords: *Regional Financial Efficiency Ratio, Regional Financial Effectiveness Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Poverty*

Acknowledge by

Head of Development Economics Department



Dr. Mukhlis, S.E, M.Si

NIP. 197304062010121001

Advisor



Dr. Abdul Bashir, S.E, M.Si

NIP. 198506122015101101

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Maryam Nurhilma Alfiah
NIM : 01021181722013
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 Maret 2000
Alamat : Jl. Slamet Riady, Lr. Bubut,
No. 314-A-427, RT. 15, RW.02,
Kelurahan 10 Ilir, Ilir Timur III,
Palembang, Sumatera Selatan

No. *Handphone* : 0895420801265
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Tinggi Badan : 155 cm
Berat Badan : 50 kg
Email : maryamnurhilmaa@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- 2004-2005 : TK Sumbangsih Palembang
- 2005-2011 : SD IT Kamiliyah Palembang
- 2011-2014 : SMP Negeri 04 Palembang
- 2014-2017 : SMA YPI Tunas Bangsa Palembang
- 2017-2024 : Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya

Pengalaman Organisasi

- Staf Muda Sekretaris Kabinet BEM KM FE UNSRI 2018-2019
- Staf Ahli Sekretaris Kabinet BEM KM FE UNSRI 2019-2020

Pendidikan Non-Formal

- Kursus Suliet UNSRI 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori	17
2.1.1 Teori Kemiskinan	17
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah	20
2.2 Konsep dan Definisi	24
2.2.1 Keuangan Daerah.....	24
2.2.2 Kinerja Keuangan Daerah.....	25
2.2.3 Rasio Keuangan Daerah.....	28
2.3 Penelitian Terdahulu.....	36
2.4 Kerangka Pikir.....	42
2.5 Hipotesis	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	45
3.2 Data Penelitian.....	45

3.2.1 Jenis Data.....	45
3.2.2 Sumber Data.....	45
3.3 Teknik Analisis Data	46
3.3.1 Metode Regresi Data Panel.....	47
3.3.2 Pemilihan Regresi Data Panel.....	48
3.3.3 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.3.4 Uji Statistik	52
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Hasil Penelitian.....	55
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	55
4.2 Gambaran Umum Variabel Penelitian	56
4.2.1 Tingkat Kemiskinan di Indonesia	56
4.2.2 Rasio Keuangan Daerah.....	58
4.3 Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel	60
4.3.1 Analisis Regresi Data Panel.....	60
4.3.2 Pemilihan Teknik Model Estimasi Data Panel.....	63
4.4 Uji Asumsi Klasik	66
4.4.1 Uji Normalitas.....	66
4.4.2 Uji Heteroskedastisitas	67
4.4.3 Uji Multikolinearitas	67
4.4.4 Uji Autokorelasi.....	68
4.5 Uji Statistik.....	69
4.5.1 Uji F.....	69
4.5.2 Uji T.....	69
4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)	70
4.6 Hasil Pembahasan	70
4.6.1 Pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan	72
4.6.2 Pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan	73

4.6.3 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan	74
4.6.4 Pengaruh Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Tingkat Kemiskinan	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Adolf Wagner	22
Gambar 2.2 Kurva Peacock dan Wiseman	23
Gambar 2.3 Kerangka Pikir	43
Gambar 4.1 Peta Negara Indonesia	55
Gambar 4.2 Tingkat Kemiskinan	57
Gambar 4.3 Rasio Keuangan Daerah	58
Gambar 4.4 Hasil Uji Normalitas	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Tingkat Kemiskinan dan Rasio Keuangan Daerah di Indonesia Tahun 2019-2021	2
Tabel 1.2 Data Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 Provinsi di Indonesia (Dalam Bentuk %)	3
Tabel 1.3 Data Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2021 (Dalam Bentuk %)	7
Tabel 1.4 Data Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2021 (Dalam Bentuk %)	9
Tabel 1.5 Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2021 (Dalam Bentuk %)	12
Tabel 2.1 Kriteria Penilaian Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah.....	31
Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah.....	32
Tabel 2.3 Tingkat dan Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah.....	34
Tabel 4.1 Hasil Uji Regresi Data Panel Common Effect Model.....	61
Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Data Panel Fixed Effect Model.....	61
Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Data Panel Model Random Effect	63
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow	64
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman	65
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas	67
Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas.....	68
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi	68
Tabel 4. 9 Output Estimasi Regresi Data Panel.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data dalam Regresi	84
Lampiran 2 Hasil Uji Regresi Data Panel Common Effect Model	97
Lampiran 3 Hasil Uji Regresi Data Panel Fixed Effect Model.....	97
Lampiran 4 Hasil Uji Regresi Data Panel Random Effect Model	97
Lampiran 5 Hasil Uji Chow	98
Lampiran 6 Hasil Uji Hausman.....	98
Lampiran 7 Hasil Uji Normalitas	98
Lampiran 8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	98
Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinieritas	99
Lampiran 10 Hasil Uji Autukorelasi	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Di Indonesia, masih terjadi masalah kemiskinan yang cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia serta produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi kebutuhannya atau belum berproduksi.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar 0.67%. Ini disebabkan karena pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 dimana kebanyakan masyarakat kehilangan pekerjaannya.. Sedangkan pada tahun 2020-2021 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0.06%.

**Tabel 1.1 Data Tingkat Kemiskinan dan Rasio Keuangan Daerah di
Indonesia Tahun 2019-2021**

Tahun	Tingkat Kemiskinan	Rasio Efisiensi	Rasio Efektivitas	Rasio Kemandirian
2019	9,31	99,88	85,10	103,34
2020	9,98	100,28	65,79	96,32
2021	9,92	98,51	80,68	83,38

Sumber: Data Diolah

Dari **tabel 1.1** di atas menunjukkan bahwa rasio efisiensi di Indonesia tahun 2019 memiliki nilai sebesar 99,88%; tahun 2020 sebesar 100,28%; dan tahun 2021 sebesar 98,51%. Pada tahun 2019 dan 2021, nilai rasionya berada di persentase 90% - 100% yang berarti pada tahun tersebut masuk dalam kriteria kurang efisien. Sedangkan pada tahun 2020 angka rasionya lebih dari 100% maka dinyatakan tidak efisien. **Tabel 1.1** menunjukkan bahwa dengan melihat rasio efektivitas di Indonesia pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 85,10%; tahun 2020 sebesar 65,79%, dan tahun 2021 sebesar 80,68%. Pada tahun 2019 dan 2021, nilai rasionya berada di persentase 80%-90% yang berarti pada kedua tahun tersebut masuk ke dalam kriteria cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2020 angka rasionya berada pada persentase 60%-80% maka masuk ke dalam kriteria kurang efektif. **Tabel 1.1** menunjukkan bahwa dengan melihat rasio kemandirian yang dihasilkan Indonesia pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar 103,34%; tahun 2020 sebesar 96,32%, dan tahun 2021 sebesar 83,38%. Nilai rasio kemandirian dari tahun 2019-2021 sesuai dengan tingkat kemampuan daerah secara rata-rata dianggap tinggi yang berarti pola hubungan yang terjadi adalah pola delegatif.

**Tabel 1.2 Data Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 Provinsi di
Indonesia (Dalam Bentuk %)**

PROVINSI	2021
PROV. BALI	4.62
PROV. DKI JAKARTA	4.69
PROV. KALIMANTAN SELATAN	4.69
PROV. BANGKA BELITUNG	4.78
PROV. KALIMANTAN TENGAH	5.16
PROV. KEP. RIAU	5.93
PROV. SUMATERA BARAT	6.33
PROV. KALIMANTAN TIMUR	6.40
PROV. BANTEN	6.58
PROV. MALUKU UTARA	6.63
PROV. KALIMANTAN BARAT	6.99
PROV. RIAU	7.06
PROV. SULAWESI UTARA	7.56
PROV. JAMBI	7.88
PROV. JAWA BARAT	8.18
PROV. SULAWESI SELATAN	8.65
PROV. SUMATERA UTARA	8.75
PROV. JAWA TIMUR	10.99
PROV. JAWA TENGAH	11.52
PROV. GORONTALO	11.57
PROV. SULAWESI TENGGARA	11.70
PROV. LAMPUNG	12.14
PROV. DI YOGYAKARTA	12.35
PROV. SULAWESI TENGAH	12.59
PROV. SUMATERA SELATAN	12.81
PROV. NUSA TENGGARA BARAT	13.98
PROV. BENGKULU	14.82
PROV. ACEH	15.43
PROV. SULAWESI BARAT	15.51
PROV. MALUKU	17.08
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	20.71
PROV. PAPUA BARAT	21.83
PROV. PAPUA	27.12

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di

merupakan yang terendah dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2021. Sedangkan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia pada tahun 2021.

Yacoub (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan berkaitan dengan pemenuhan yang paling mendasar dalam hidup, karena kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi hampir seluruh negara. Kemiskinan berlangsung sebab tidak adanya pemasukan untuk mencukupi kebutuhan primer. Faktor yang memastikan kemakmuran warga merupakan pendapatan. Apabila keadaan tingkatan tenaga kerja bisa terwujud hendak mencapai maksimum pemasukan warga serta dapat meningkatkan pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya mengoptimalkan peranan sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan 4 ekonomi yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan juga semakin meningkat. Anggaran belanja dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Anggaran pendapatan dan belanja yang dikumpulkan tertuang dalam suatu program atau rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelola keuangan daerah dalam tahun tertentu yang berisi pendapatan dan pembiayaan dana pemerintah. Otonomi daerah merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah untuk

mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat daerahnya, tujuan utama otonomi daerah ini adalah untuk meningkatkan daerah yang bersangkutan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri guna meningkatkan sumber daya guna hasil dari segenap potensi yang dimiliki. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah serta mengurangi pengangguran yang selanjutnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya otonomi memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk mengelola dan melakukan pembaharuan sistem keuangan pemerintah daerah, pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada publik. Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut dilakukan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Anggaran sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang baik. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek positif, salah satunya yaitu menurunkan tingkat kemiskinan.

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran. Perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran diukur

dengan menggunakan beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian (Halim, 2008). Sedangkan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio efektivitas dan efisiensi PAD, derajat kontribusi BUMD, debt service coverage ratio, dan rasio pendapatan terhadap utang. Sejalan dengan tujuan analisis rasio keuangan, maka ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan hal ini akan membuka kesempatan bagi daerah untuk mengurangi jumlah pengangguran, menurunkan jumlah masyarakat miskin, meningkatkan indeks pembangunan manusia serta menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat atau indeks gini.

Menurut Halim (2007: 234-241), pengukuran efisiensi dan efektivitas keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara menghitung Rasio Efisiensi dan Rasio Efektivitas Keuangan daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi penerimaan daerah. Sedangkan rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara output yang diharapkan dengan input yang dikeluarkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditentukan.

Tabel 1.3 Data Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi di Indonesia

Tahun 2021 (Dalam Bentuk %)

PROVINSI	2021
PROV. KALIMANTAN TENGAH	88.17
PROV. BANGKA BELITUNG	91.02
PROV. SULAWESI TENGAH	92.41
PROV. JAMBI	92.85
PROV. DKI JAKARTA	93.97
PROV. SUMATERA UTARA	94.23
PROV. BENGKULU	94.37
PROV. GORONTALO	94.58
PROV. LAMPUNG	95.02
PROV. RIAU	95.19
PROV. SUMATERA BARAT	96.46
PROV. DI YOGYAKARTA	96.96
PROV. JAWA TENGAH	97.03
PROV. KALIMANTAN SELATAN	97.15
PROV. KEP. RIAU	97.21
PROV. KALIMANTAN BARAT	98
PROV. ACEH	98.1
PROV. SULAWESI BARAT	98.1
PROV. JAWA TIMUR	98.75
PROV. MALUKU	98.75
PROV. SULAWESI TENGGARA	99.26
PROV. BANTEN	100.32
PROV. JAWA BARAT	101.29
PROV. SULAWESI SELATAN	101.57
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	103.69
PROV. MALUKU UTARA	104.01
PROV. NUSA TENGGARA BARAT	104.09
PROV. SUMATERA SELATAN	104.67
PROV. KALIMANTAN TIMUR	104.92
PROV. BALI	105.86
PROV. PAPUA	107.01
PROV. PAPUA BARAT	109.73
PROV. SULAWESI UTARA	109.97

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa angka rasio efisiensi di

Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 88.17% dimana dalam kriteria efisiensi termasuk dalam persentase 80%-90% dengan kriteria cukup efisien. Pada Provinsi Bangka Belitung (91.02%), Provinsi Sulawesi Tengah (92.41%), Provinsi Jambi (92.85%), Provinsi DKI Jakarta (93.97%), Provinsi Sumatera Utara (94.23%), Provinsi Bengkulu (94.37%), Provinsi Gorontalo (94.58%), Provinsi Lampung (95.02%), Provinsi Riau (95.19%), Provinsi Sumatera Barat (96.46%), Provinsi DI Yogyakarta (96.96%), Provinsi Jawa Tengah (97.03%), Provinsi Kalimantan Selatan (97.15%), Provinsi Kepulauan Riau (97.21%), Provinsi Kalimantan Barat (98%), Provinsi Aceh (98.1%), Provinsi Sulawesi Barat (98.1%), Provinsi Jawa Timur (98.75%), Provinsi Maluku (98.75%), Provinsi Sulawesi Tenggara (99.26%) angka rasio efisiensinya termasuk dalam persentase 90%-100% dimana angka ini tergolong dalam kriteria kurang efisien. Selanjutnya, pada Provinsi Banten (100.32%) Provinsi Jawa Barat (101.29%), Provinsi Sulawesi Selatan (101.57%), Provinsi Nusa Tenggara Timur (103.69%), Provinsi Maluku Utara (104.01%), Provinsi Nusa Tenggara Barat (104.09%), Provinsi Sumatera Selatan (104.67%), Provinsi Kalimantan Timur (104.92%), Provinsi Bali (105.86%), Provinsi Papua (107.01%), Provinsi Papua Barat (109.73%), Provinsi Sulawesi Utara (109.97%) angka rasio efisiensinya termasuk dalam persentase >100% dimana termasuk dalam kriteria tidak efisien.

Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan.

**Tabel 1.4 Data Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi di
Indonesia Tahun 2021 (Dalam Bentuk %)**

PROVINSI	2021
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	45.53
PROV. ACEH	63.69
PROV. DKI JAKARTA	66.63
PROV. MALUKU UTARA	70.94
PROV. MALUKU	71.68
PROV. NUSA TENGGARA BARAT	72.57
PROV. KALIMANTAN SELATAN	73.74
PROV. KALIMANTAN BARAT	74.04
PROV. JAWA BARAT	75.19
PROV. SULAWESI UTARA	76.13
PROV. BALI	77.4
PROV. JAWA TENGAH	78.25
PROV. SULAWESI SELATAN	78.94
PROV. SUMATERA SELATAN	80.61
PROV. LAMPUNG	81.54
PROV. BENGKULU	82.07
PROV. RIAU	82.25
PROV. KALIMANTAN TENGAH	84.12
PROV. KEP. RIAU	88.06
PROV. SUMATERA BARAT	88.3
PROV. KALIMANTAN TIMUR	88.47
PROV. SULAWESI BARAT	89.58
PROV. PAPUA BARAT	89.85
PROV. SULAWESI TENGGARA	91.01
PROV. DI YOGYAKARTA	91.28
PROV. PAPUA	92.17
PROV. BANTEN	92.55
PROV. JAWA TIMUR	94.62
PROV. SUMATERA UTARA	95.65
PROV. SULAWESI TENGAH	97.42
PROV. GORONTALO	98.94
PROV. JAMBI	103.38
PROV. BANGKA BELITUNG	108.59

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa angka rasio efektivitas pada

Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 45.53% , Provinsi Aceh sebesar 63.69%, Provinsi DKI Jakarta sebesar 66.63%, Provinsi Maluku Utara sebesar 70.94%, Provinsi Maluku sebesar 71.68%, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 72.57%, Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 73.74%, Provinsi Kalimantan Barat sebesar 74.04% dimana angka-angka tersebut masuk dalam persentase <75% dimana tergolong dalam kriteria tidak efektif. Pada Provinsi Jawa Barat (75.19%), Provinsi Sulawesi Utara (76.13%), Provinsi Bali (77.4%), Provinsi Jawa Tengah (78.25%), Provinsi Sulawesi Selatan (78.94%), Provinsi Sumatera Selatan (80.61%), Provinsi Lampung (81.54%), Provinsi Bengkulu (82.07%), Provinsi Riau (82.25%), Provinsi Kalimantan Tengah (84.12%), Provinsi Kepulauan Riau (88.06%), Provinsi Sumatera Barat (88.3%), Provinsi Kalimantan Timur (88.47%), Provinsi Sulawesi Barat (89.58%), Provinsi Papua Barat (89.85%) termasuk dalam persentase 75%-89% dimana kriteria efektivitas nya tergolong dalam kurang efektif. Kriteria efektivitas yang tergolong dalam kriteria cukup efektif adalah jika rasio tersebut berada di angka 90%-99% dimana Provinsi Sulawesi Tenggara (91.01%), Provinsi DI Yogyakarta(91.28%), Provinsi Papua (92.17%) Provinsi Banten (92.55%), Provinsi Jawa Timur (94.62%), Provinsi Sumatera Utara (95.65%), Provinsi Sulawesi Tengah (97.42%), Provinsi Gorontalo (98.94%) termasuk dalam kriteria tersebut. Sedangkan provinsi yang termasuk dalam kriteria sangat efektif dimana persentase nya berada di atas 100% adalah Provinsi Jambi (103.38%) dan Provinsi Bangka Belitung (108.59%).

Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan

daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya, mengukur kontribusi masing – masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Halim, 2008). Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah, sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik (Ardhini, 2011). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah. Untuk terciptanya kemandirian Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga pembangunan daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah, sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik. Rasio kemandirian keuangan daerah bermanfaat untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

**Tabel 1.5 Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di
Indonesia Tahun 2021 (Dalam Bentuk %)**

PROVINSI	2021
PROV. PAPUA BARAT	7.07
PROV. PAPUA	18.23
PROV. MALUKU	21.84
PROV. ACEH	21.92
PROV. MALUKU UTARA	23.76
PROV. SULAWESI BARAT	25.35
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR	30.95
PROV. GORONTALO	35.01
PROV. SULAWESI TENGGARA	44.03
PROV. SULAWESI TENGAH	47.45
PROV. BENGKULU	47.64
PROV. SULAWESI UTARA	49.9
PROV. DI YOGYAKARTA	50.09
PROV. BANGKA BELITUNG	51.18
PROV. NUSA TENGGARA BARAT	55.31
PROV. KALIMANTAN TENGAH	55.89
PROV. KEP. RIAU	57.17
PROV. SUMATERA BARAT	62.58
PROV. JAMBI	64.01
PROV. KALIMANTAN BARAT	64.65
PROV. SUMATERA SELATAN	67.66
PROV. RIAU	76.07
PROV. LAMPUNG	77.2
PROV. SULAWESI SELATAN	82.36
PROV. SUMATERA UTARA	85.16
PROV. BALI	111.28
PROV. KALIMANTAN SELATAN	119.94
PROV. JAWA BARAT	122.45
PROV. JAWA TENGAH	123.78
PROV. JAWA TIMUR	124.63
PROV. KALIMANTAN TIMUR	149.28
PROV. BANTEN	152.15
PROV. DKI JAKARTA	183.5

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa Provinsi Papua Barat

(7.07%), Provinsi Papua (18.23%), Provinsi Maluku (21.84%), Provinsi Aceh (21.92%), Provinsi Maluku Utara (23.76%), berada dalam angka persentase di bawah 25% yang berarti tingkat kemampuan daerah nya sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Pada Provinsi Sulawesi Barat (25.35%), Provinsi Nusa Tenggara Timur (30.95%), Provinsi Gorontalo (35.01%), Provinsi Sulawesi Tenggara (44.03%), Provinsi Sulawesi Tengah (47.45%), Provinsi Bengkulu (47.64%), Provinsi Sulawesi Utara (49.9%) angka persentase rasio nya berada di kisaran 25%-50% yang berarti bahwa tingkat kemampuan daerah pada provinsi-provinsi tersebut masih terbilang rendah dengan pola hubungan konsultatif. Pada Provinsi DI Yogyakarta (50.09%), Provinsi Bangka Belitung (51.18%), Provinsi Nusa Tenggara Barat (55.31%), Provinsi Kalimantan Tengah (55.89%), Provinsi Kepulauan Riau (57.17%), Provinsi Sumatera Barat (62.58%), Provinsi Jambi (64.01%) angka persentase rasio efektivitas nya berada di atas 50%-75% ini berarti bahwa tingkat kemampuan daerah pada provinsi-provinsi tersebut adalah sedang dengan pola hubungan partisipatif. Pada Provinsi Riau (76.06%), Provinsi Lampung (77.2%), Provinsi Sulawesi Selatan (82.36%), Provinsi Sumatera Utara (85.16%), Provinsi Bali (111.28%), Provinsi Kalimantan Selatan (119.94%), Provinsi Jawa Barat (122.45%), Provinsi Jawa Tengah (123.78%), Provinsi Jawa Timur (124.63%), Kalimantan Timur (149.28%), Provinsi Banten (152.15%), Provinsi DKI Jakarta (183.5%) angka persentase rasio efektivitas nya berada di 75%-100% atau lebih dari 100% yang berarti bahwa tingkat kemampuan daerah provinsi-provinsi tersebut tinggi dengan pola hubungan delegatif. Provinsi DKI Jakarta memiliki angka persentase kemandirian tertinggi

pada tahun 2021 sebesar 183.5% dengan pola hubungan delegatif yang berarti bahwa sudah tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah pusat karena daerah tersebut telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan urusan kegiatan daerahnya. Sedangkan angka persentase kemandirian terendah berada pada Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 7.07% dengan pola hubungan instruktif yang berarti bahwa daerah tersebut tidak mampu melaksanakan kegiatan daerahnya sehingga peranan pemerintah pusat sangat diperlukan dalam hal ini.

Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah (Mahmudi, 2016). Rasio kemandirian keuangan daerah bermanfaat untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin besar PAD terhadap total pendapatan daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan akan menurun. Rasio efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja bermanfaat untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD serta untuk mengontrol biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penghematan anggaran. Semakin tinggi realisasi penerimaan PAD dengan tingkat biaya yang rendah maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat mengefektifkan berbagai program untuk mengatasi tingkat kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Apakah Rasio Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
4. Apakah Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tingkat kemiskinan di Indonesia
2. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada tingkat kemiskinan di Indonesia
3. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada tingkat kemiskinan di Indonesia
4. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dan berguna untuk menjadi referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa yang dapat dilihat nantinya dan menjadi penilaian tersendiri bagi mahasiswa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Alamanda. (2020). The Effect of Government Expenditure. *Info Artha*, 4(01), 1– 11.

Annisa, F. (2017). *Analisis Kinerja Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dampaknya terhadap Kemiskinan, Pengangguran, Indeks, Pembangunan Manusia dan Indeks Gini*.

Artanti, A., & Adinugraha, H. H. (2020). AmaNU: Jurnal Manajemen dan Ekonomi. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 3(2), 2620–7680. <http://repository.usu.ac.id>

Budianto, A. (2020). *Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2016-2020*. 32.

Budiarso, N., Tinangon, J., & Rondonuwu, R. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 23–32.

Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, 8(1), 33–48.

Ferry, P. (2012). Modul Ekonomi Publik, Bagian V: Teori Pengeluaran Pemerintah. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-V-Teori-Pengeluaran-Pemerintah.pdf>

Fitri, vella K. (2019). *Pengaruh Rasio Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau Tahun 2009-2012*. 1–15.

Hafidh, A. A. (2015). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam

Mempengaruhi Belanja Modal Publik Bagi Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 18(2), 109–120.
<https://doi.org/10.21831/hum.v18i2.3154>

Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23–33.

Matematika, J., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Industri, J. T., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., & Karya, T. (2022). Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau Menggunakan Metode Analisis Regresi Sederhana. 1(3), 131–136.

Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 116–121.
<https://doi.org/10.26740/jupe.v8n3.p116-121>

Moridu, I. . H. O. (2017). Analisis Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai. *Journal EMOR*, 2(2), 167–183.

Muhammad Zulkarnain, Yulina Astuti, E. W. (2019). Pengaruh Rasio Keuangan

Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 3(1), 65–73.

Nafi'ah, B. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia (2016- 2019). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 953–960. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2206>

Oktavia, N. E. M., & Soelistyo, A. (2018). *Jurnal Ilmu Ekonomi*. 4(1), 224–

234.

Pratama, Y. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia. *Esensi*, 4(2), 210–223. <https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966>

Prawoto, N. (2008). Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.*, 9(1), 56–68. <https://doi.org/10.18196/jesp.9.1.1530>

Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215.

Purwanto, E. A. (2007). Mengkaji Potensi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pembuatan Kebijakan Anti Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(3), 295–324.

Puspita sari, A. M. (2000). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012. *Journal of Visual Languages & Computing*, 11(3), 287–301.

Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526>

Rante, A., Mire, M. S., Paminto, A., Liantino, W., Nurhasanah, Maria, Ii, B. A. B., & Hipotesis, D. A. N. (2018). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Aset Daerah (BPPKAD) Di Kota Surakarta. *Inovasi*, 13(2), 92.

Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja pada Pemerintahan

Kota Magelang Salwa Qur, A., Kartini Panggiarti, E., & Qur, S. (2021). the Analysis of Territory Financial Ratio As Performance Value in the Government of Magelang City. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 60–70. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Saragih, F., & Siregar, I. A. (2021). Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Scenario*, 43–53.

Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>

Yacoub, Y. (2012). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. 8, 176–185.